

BERANTAS PREMANISME SAMPAI BATAS MINIMAL

Oleh GPB Suka Arjawa

Penangkapan terhadap Hercules dan anak buahnya, mencuatkan isu tentang upaya pemerintah untuk menghilangkan preman di Jakarta dan Indonesia pada umumnya. Isu tersebut membangkitkan rasa percaya diri masyarakat di kota-kota lain, terutama wilayah yang sering kali diganggu oleh pemerasan, pemalakan, pencurian bahkan perampokan. Masyarakat berpandangan bahwa keinginan itu, tidaklah boleh setengah-setengah dan hanya dilakukan jika ada kepentingan-kepentingan tertentu. Bisa saja misalnya, penangkapan preman dilakukan demi kepentingan kelompok tertentu. Atau manakala mereka merugikan kepentingan tokoh-tokoh penting negara. Yang terakhir ini jelas keliru karena kejahatan tidak bisa dibiarkan dan hanya ditekan kalau ada kepentingan tertentu.

Banyak pendapat tentang munculnya aktivitas yang bersifat premanisme tersebut, seperti misalnya ada kelemahan dari aparat keamanan sehingga kelompok ini bisa merajalela di berbagai tempat. Pandangan ini sudah lumrah dan telah menjadi cara pandang masyarakat untuk menjelaskan kata "freeman" tersebut. Namun, sebagai sebuah sebab musabab, penting juga dikaitkan dengan persoalan sosiologi lingkungan (kota) serta masalah kesenjangan ekonomi. Boleh dikatakan dua hal ini menjadi faktor pendukung utama munculnya kelompok "freeman" itu.

Lingkungan mempunyai makna yang amat luas. Di dalamnya adalah persoalan demografi, geografi, penataan ruang, termasuk di dalamnya ketertiban sosial. Secara demografis, kota merupakan wilayah yang mempunyai penduduk (jauh) lebih padat ketimbang dengan desa. Kepadatan penduduk akan memicu persaingan hidup, terutama untuk memenuhi keperluan sandang, pangan dan papan. Kekalahan pada bidang ini akan merangsang tumbuhnya kecemburuan, kebencian, kekesalan sosial yang kemudian memicu kejahatan dalam berbagai bentuk. Geografi menyangkut masalah bentuk kota, penampakan dari kota yang memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkannya sesuai dengan kepentingannya. Kota yang berbukit-bukit tentu membuat masyarakat kurang nyaman dibanding dengan kota yang datar. Tetapi kota yang berbukit memudahkan bagi penjahat untuk menyembunyikan diri. Penataan kota sangat tergantung dari pola perencanaan sosial sebelumnya. Apabila pola tempat tinggal dan tempat hunian sembarut, pola pedagang tidak jelas dan kacau balau, akan memungkinkan kejahatan meningkat. Rumah kos dan kontrakan yang menempel dengan perkampungan atau perumahan memunculkan wilayah kumuh, memudahkan menjelma menjadi sarang kejahatan. Warung yang tidak tertata memancing munculnya "tukang tata" swasta dengan meminta uang pungut liar. Semua keadaan demikian, apabila diikuti oleh tidak adanya jaminan ketertiban hukum, merupakan sebuah peristiwa akumulatif yang memungkinkan memunculkannya kejahatan. Salah satu bagiannya adalah preman tersebut.

Dengan alur pikiran seperti di atas, maka bisa dikatakan bahwa premanisme, yakni sebuah gaya hidup untuk memenuhi segala tujuan dengan cara pemerasan dan kekerasan, akan

bisa muncul tidak saja di kota-kota besar tetapi meluas ke wilayah lainnya. Preman bisa muncul di kota kecil, kota kecamatan bahkan di pedesaan. Ini disebabkan karena sangat tergantung dari geografis, demografis, penataan ruang dan ketertiban hukum di wilayah itu. Sebagai sebuah contoh, di satu wilayah di Karangasem, kabupaten paling timur di Pulau Bali, sikap premanisme muncul terhadap truk-truk pengangkut pasir. Ini disebabkan karena jalur pengangkutan tersebut melewati ruas jalan tepi perumahan penduduk, kondisi jalannya rusak dengan tikungan tajam, dan dikitari hutan. Tidak ada pihak keamanan formal yang menjaga disana. Akibatnya, premanisme (tepatnya bibit-bibit preman) telah mulai muncul dengan meminta pungutan liar kepada truk-truk pengangkut pasir yang lewat.

Kompetisi ekonomi jelas menjadi pemicu munculnya sikap premanisme juga. Himpitan ekonomi dan pengaruh media iklan, termasuk tayangan televisi yang menampilkan gaya hidup mewah, menjadi akumulasi sempurna terhadap munculnya gaya hidup premanis ini. Ekonomi dan perputaran uang, biasanya dihidupkan oleh formalisme perdagangan. Namun demikian, formalisme itu sering dibelit oleh penipuan-penipuan yang menjengkelkan masyarakat. Sebuah pembangunan kompleks perumahan misalnya, memerlukan berbagai macam ijin dari pihak pemerintah. Namun dalam perjalanannya, berbagai penipuan muncul di dalam pembangunan tersebut, entah manipulasi ijin, gambar, kualitas bangunan, luas bangunan dan sebagainya yang sering memberikan rasa kecewa kepada masyarakat. Dengan sikap munafik seperti itu, ditambah dengan tuntutan ekonomi yang tinggi sebagai akibat dari gencarnya nilai konsumerisme melalui media massa, orang-orang yang bersikap nekat dan frustrasi bisa saja mencari jalan pintas untuk mencapai kemakmuran. Dalam pandangan mereka, formalisme ijin yang dibelit dengan kebohongan dan penipuan mempunyai nilai tidak berbeda dengan kejahatan. Kelompok-kelompok nekat demikian, secara sepihak memakai legitimasi kemunafikan tersebut untuk melancarkan sikap premaninya.

Preman-preman yang ada, terutama kota besar dengan berbagai kegiatan ekonomi dan perkembangan lingkungannya, pertumbuhannya bisa dilacak latar belakangnya dari kondisi seperti ini. Jadi, faktor lingkungan, demografis, geografis, ekonomi dan kemunafikan serta kurangnya pengawasan dari pihak keamanan akan memicu tumbuh suburnya perilaku urakan, ngawur dan "berideologi" preman tersebut.

Karena adanya kata "isme" itu, yakni sebuah paham, sebuah ajaran atau pola hidup yang di dalam politik biasa disebut ideologi, maka preman pasti akan memunculkan banyak aliran. Ia mirip sekte bahkan agama yang masing-masing memiliki tokoh panutan. Masing-masing tokoh ini mempunyai latar belakang kehidupan sendiri dan kemudian mempraktikkan kepremanannya itu berdasarkan latar belakang tersebut. Panafsiran terhadap cara hidup muncul dari latar belakang itu. Kelompok preman juga amat mungkin pecah kongsi karena konflik internal yang diprakarsai oleh para tokoh berpengaruh di dalam kelompok. Karena itulah ada kelompok preman yang keras, sadis, tetapi juga ada kelompok yang boleh dikatakan lebih "lunak" menjalankan aksinya. Semuanya tergantung dari latar belakang sang tokoh. Dengan alur pemikiran seperti ini, maka bisa dipahami kalau di dalam satu kota atau wilayah ada banyak kelompok preman.

Jadi, apabila misalnya ingin memberantas preman, sangatlah mustahil kalau hanya menangkap satu kelompok saja. Preman akan tetap hidup karena kelompok lain masih berkeliaran. Malah kelompok tertentu merasa bersyukur kalau misalnya pihak keamanan memberangus satu kelompok karena mungkin saja kelompok ini menjadi pesaingnya. Yang paling ditekankan dalam memberantas preman adalah benahi pola tempat tinggal, tertibkan persoalan kependudukan, buka persaingan ekonomi secara adil, dan pihak keamanan harus awas dengan kontur geograafis di dalam satu wilayah. Seperti halnya manusia itu sendiri, kejahatan mungkin tidak bisa diberatnas sampai batas yang nihil, tetapi ditekan sampai batas paling minim. Negara bertugas untuk memilih alternatif yang terakhir ini.****

Penulis adalah pengamat sosial dari FISIP, Universitas Udayana.